

INDEKS KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI KOTA KENDARI DITINJAU DARI ASPEK HUBUNGAN SOSIAL, HUBUNGAN KEAGAMAAN, NILAI DAN PERAN PEMERINTAH¹

Oleh
Muh Abas²
Pendais Haq³

ABSTRAK

Fakta keberagaman agama dan kepercayaan masyarakat adalah sebuah keniscayaan di Indonesia. Keberagaman ini disatu sisi bisa menjadi sumber kekuatan dan potensi bangsa dalam membangun sebuah peradaban manusia, namun disisi lain jika tidak dikelola dan dirawat dengan baik bisa menjadi sumber konflik yang justru dapat menghancurkan kemanusiaan itu sendiri. Tentunya itu juga bertentangan dengan fitra yang melandasi mengapa manusia harus beragama di bumi ini. Untuk itu, cerita konflik selalu melahirkan berbagai bentuk analisa dan paradigma bagi siapapun yang menyoroanya. Di kota Kendari dapat dimasukan sebagai kota yang multi kultur dan agama. Beberapa data yang diperoleh saat ini ada lima agama yang memiliki penganut dan tersebar pada 10 kecamatan yang ada di kota Kendari yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu dan Budha. Secara teoritis sosiologis keberagaman (pluralitas) pasti menyimpan potensi konflik sehingga dalam konteks hubungan umat beragama sangat tergantung dari pola komunikasi dan toleransi yang dibangun oleh masing-masing umat beragama. Melalui penelitian penggabungan antara kuantitatif dan kualitatif yang dipusatkan di 2 kecamatan yaitu Kadia dan Kecamatan Mandonga dengan jumlah responden 130 orang yang diambil dari unsur-unsur umat beragama, diperoleh hasil bahwa Kota Kendari termasuk daerah yang memiliki tingkat toleransi yang kuat namun disisi lain pada tingkatan grassroot dan aspek-aspek tertentu masih menyimpan masalah dan ketegangan walaupun memang tidak meluas dan terkuak. Dari 4 aspek yang dilihat yaitu hubungan sosial, hubungan keagamaan, nilai yang melandasi hubungan kerukunan, dan peran pemerintah menunjukkan hubungan keagamaan masih rendah yaitu indeks 2,7 sedangkan hubungan sosial dan peran pemerintah relatif baik yang berada pada indeks 3,0, akan tetapi belum berada pada posisi maksimal. Dengan demikian diperlukan upaya dan penguatan kerukunan sebagai bentuk *preventif approach* dan perawatan kerukunan umat beragama di Kota Kendari.

Kata Kunci: *Umat Beragama, Potret dan Kerukunan*

PENDAHULUAN

Keberagaman agama dan pemeluk agama di Indonesia menjadi sebuah kenyataan yang tak terbantahkan. Kenyataan ini menuntut adanya kesadaran dari setiap pemeluk agama untuk menjaga keharmonisan hubungan di antara mereka. Semua pemeluk agama memang harus mawas diri dan belajar nilai-nilai positif dari agama yang dianutnya. Yang harus disadari adalah bahwa mereka hidup dalam sebuah masyarakat dengan keyakinan agama yang beragam.

Masyarakat yang beragam sesungguhnya merupakan bagian dari proses sosial yang bersifat alami karena memang sejatinya manusia akan selalu melakukan

¹ Disadur dari hasil penelitian 2015

² Dosen FKIP UHO

³ Dosen FKIP UHO

pengembaraan (migrasi) selain sebagai bentuk mengejawantahan diri yang akan selalu mencari kebutuhan hidupnya juga sebagai bentuk luapan emosi kejiwaan sebagai pengembara (Munir, 2011). Walaupun demikian rekayasa sosial (*social engineering*) juga tidak dapat dipungkiri yang mendorong terjadinya keberagaman misalnya saja transmigrasi. Migrasi dalam berbagai bentuknya itulah yang melahirkan bentuk akulturasi dan asimilasi sehingga penyebaran dan perkembangan keyakinan dan agama menjadi keniscayaan dalam masyarakat tak terkecuali di Sulawesi Tenggara.

Migrasi antar penduduk baik melalui jalur kultural (perdagangan) maupun politik (kepentingan antar dua kerajaan) membentuk corak masyarakat nusantara yang beragam jauh sebelum kemerdekaan. Kehadiran orang Bugis di Kalimantan Timur misalnya sudah dimulai sejak zaman kerajaan. Kebijakan transmigrasi Orde Baru tahun 1970-1990an semakin menyemarakkan keanekaragaman tersebut. Struktur sosial masyarakat di beberapa daerah khususnya di Kawasan Timur Indonesia, termasuk Provinsi Sulawesi Tenggara perlahan-lahan mengalami perubahan. Daerah-daerah yang semula dominan beragama tertentu mau tidak mau harus mulai terbiasa dengan menerima saudara berbeda agama di wilayahnya. Sesekali ada ketegangan. Beberapa wilayah di Papua sempat menolak ide transmigrasi karena menganggap ada agenda Islamisasi yang terselubung di belakangnya (Toni Wanggai, 2009 : 152).

Beberapa fase kepemimpinan (orde) telah diterbitkan dan dikembangkan berbagai bentuk regulasi untuk mendukung kerukunan umat beragama itu. Regulasi tersebut antara lain diawali dengan UUD 1945 pada pasal 29, khususnya ayat 2 yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaan serta meyakini agama dan kepercayaan tersebut. Hal ini menunjukkan adanya kebebasan beragama di Indonesia sesuai dengan nurani tiap orang. Namun yang terpenting dari kebebasan itu, adalah tanggung jawab dan kemauan untuk saling menjaga dan memberi ruang bagi kebebasan yang lain. Inilah yang menjadi dasar dari kerukunan tersebut.

Selanjutnya beberapa regulasi yang dianggap terkait dengan kerukunan beragama adalah UU No 1/PNPS/1965 tentang larangan penidaaan dan penyalahgunaan agama. Keputusan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri No 1 /Ber/Mdn/1965 tentang pelaksanaan oleh pemerintah daerah tentang jaminan pemeluk agama melaksanakan ajaran agamanya. SK menteri agama dan menteri dalam negeri no.1/1979 tentang tata cara penyiaran agama dan aturan bantuan luar negeri terhadap lembaga swasta untuk kegiatan keagamaan. Surat edaran menteri agama RI tentang penyelenggaraan hari raya No.MA/432.1981. Paling anyar adalah Peraturan Bersama Menteri (PBM) antara menteri dalam negeri dan menteri agama Nomor 8 dan Nomor 9 tahun 2006.

Selain itu salah satu regulasi yang terkait dengan kebebasan beragama adalah UU 39/1999. UU ini muncul setelah Indonesia meratifikasi aturan HAM. Khusus yang terkait dengan agama adalah pasal 22 yang mengandung makna bahwa setiap warga Negara Indonesia dijamin oleh Negara untuk memeluk agama dan keyakinan tertentu. Pasal ini sendiri semakna dengan UUD 45 pasal 29.

Peran pemerintah memang sangat dibutuhkan dalam merawat dan menjaga rakyat agar tidak terjatuh dalam konflik. Peran itu tidak harus selalu berujung pada pembuatan regulasi yang sifatnya multitafsir. Peran itu bisa dilakukan dengan mendorong masyarakat secara mandiri menjaga kerukunan.

Kerukunan bagi orang Indonesia adalah keniscayaan. Masyarakat Indonesia telah memiliki pengalaman panjang tentang merawat kerukunan. Masyarakat Indonesia pun

memiliki mekanisme kultural untuk mendamaikan keragaman dan perbedaan etnik atau agama yang sakral sekalipun. Ia lazim disebut kearifan lokal, *local wisdom*, sebuah kebijaksanaan yang ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Selain itu, kelompok yang menginginkan perdamaian dan kerukunan juga muncul dimana-mana. Baik dalam bentuk organisasi sosial maupun individu seperti Gus Dur, Johan Efendi, Cak Nur, Jusuf Kalla dan tokoh lainnya. Artinya, kalau pun ada konflik atau kekerasan yang terjadi bersamaan dengan itu muncul pula inisiasi perdamaian baik dalam konteks perseorangan maupun kelompok. Itulah dinamika keagamaan di Indonesia!

Gambaran tersebut terjadi hampir seluruh daerah-daerah di tanah air khususnya daerah yang tergolong plural termasuk di Kota Kendari. Identifikasi awal ditemukan bahwa beberapa ada beberapa lokasi antara lain di punggolaka Powatu dan Jalan Mekar Mandonga pernah terjadi keributan terkait dengan rencana pembangunan gereja, akan tetapi kondisi ini cepat diatasi dalam bentuk dialog. Tentunya potret ini menjadi informasi dan bahan analisis yang berharga sebagai asesment awal dalam membangun dan meningkatkan kerukunan umat beragama di Kota Kendari.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah perpaduan antara penelitian kuantitatif deksriptif dan kualitatif deskriptif, aspek indeks diukur secara kuantitatif sedangkan aspek interelasi dan kongklusi antar aspek atau variabel dianalisis secara kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian dipusatkan pada Kecamatan Kadia karena kecamatan ini termasuk yang paling plural dari segi agama dengan jumlah sampel sebanyak 130 orang, pengambilan sampel ini menggunakan teori slovin ($n = N/1+N.d^2$).⁴ Dengan galat pendugaan 0,03 (3%) dari populasi total pemeluk agama di Kecamatan Kadia sebagai fokus penelitian ini.

Metode pengumpulan data dilakuka dalam tiga metode yaitu penyebaran angket (kuesioner) pada 130 orang responden, wawancara mendalam pada tokoh kunci masing-masing agama, dan Focus Group Discussion (FGD) khususnya pada kelompok FKUB dan kelompok organisasi keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, PRADA, GMKI dan PMKRI. Karena baru penelitian awal maka analisis dilakukan persentasi dan deskripsi dasar terkait kondisi dan hubungan masing-masing aspek yang diteliti.

PARADIGMA MEMOTRET KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI KOTA KENDARI

Sesungguhnya ada beberapa paradigma yang bisa digunakan dalam memotret secara teoritik fenomena hubungan antar umat beragama antara lain paradigma inklusivisme, pluralisme, dan multikulturalisme. Ketiga paradigma ini memberi ruang perspektif yang lebih dari cukup untuk mengkaji fenomena interaksi antar kelompok sosial yang berbeda agama.

Penelitian ini menjatuhkan pilihan pada paradigma toleransi aktif atau paradigma pluralisme. Hal ini mengacu pada paradigma Walzer yang memusatkan pada dua aspek yaitu asimilasi individu dan pengakuan hak-hak kelompok, Trisno (2010). Walzer memberikan gagasan tentang pentingnya bergerak dari titik toleransi (pasif). Menggugah kita untuk menyadari kalau toleransi (pasif) adalah bahasa kekuasaan yang sudah tidak memadai lagi digunakan dalam konteks sosial yang lebih komprehensif seperti sekarang. Ia –mengutip Milad Hanna- mengusulkan istilah “menyongsong sang liyan” atau *qabulul akhar* (menerima yang lain) sebagai bahasa baru dari toleransi yang

⁴n= jumlah Sampel, N= Jumlah Populasi, d = galat pendugaan

lebih aktif. Toleransi bukan lagi sekedar tenggang rasa tetapi aktif memberi rasa. Istilah ini bisa disederhanakan dengan menggunakan istilah toleransi aktif.

Konsep toleransi (aktif) Walzer (1997) mencakup lima hal yaitu 1.) Menerima perbedaan untuk hidup damai, 2.) menjadikan keseragaman menjadi perbedaan, 3.) menerima bahwa orang lain memiliki hak, 4.) mengekspresikan keterbukaan terhadap orang lain, ingin tahu, menghargai, ingin mendengarkan dan belajar dari yang lain, 5.) dukungan yang penuh terhadap perbedaan dan menekankan aspek otonomi.

Toleransi aktif yang dimaksud dalam penelitian ini sesungguhnya adalah pluralisme. Diana L. Eck (2003) menyebutkan ada lima ciri khas pluralisme, yaitu: pertama, pluralisme berbeda dengan pluralitas. Ia adalah "*the energetic engagement with diversity*", pergumulan yang energik (aktif) terhadap kepelbagaian. *Kedua*, pluralisme bukan (sekedar) toleransi, melainkan proses *active seeking of understanding across line of difference*, pencarian pemahaman yang aktif terhadap perbedaan. *Ketiga*, pluralisme bukan relativis melainkan *the encounter of commitment* (pergumulan komitmen). *Keempat*, pluralisme berbeda dengan sinkretisme. Pluralisme mengandaikan saling menghormati diatas basis saling menghargai perbedaan dan keunikan masing-masing tradisi agama. *Kelima*, pluralisme dibangun berdasarkan dialog (antar iman).

Inti dari paradigma Diana L Eck adalah pergumulan yang aktif dari berbagai kelompok sosial untuk saling mempelajari, saling mengetahui fondasi ajaran agama bukan untuk saling menyalahkan atau saling menyerang tetapi untuk saling menghargai perbedaan. Pluralisme bukan ajaran peleburan agama, penyamaan agama, atau nihilisme agama. Perbedaan agama menjadi sumber energi untuk membangun kebersamaan. Konsep ini penting untuk menjernihkan kekeliruan beberapa pihak yang kontra-pluralisme, dengan menganggap pluralisme adalah ajaran yang menyamakan semua agama.

Penelitian ini tidak membedakan antara paradigma toleransi aktif dan pluralisme. Toleransi aktif ala Walzer adalah pluralisme ala Diana L. Eck. Walzer menginginkan bahwa perbedaan menjadi pijakan untuk kehidupan yang lebih damai. Kelompok sosial bergerak aktif untuk saling mempelajari satu sama lain. Ini yang disebut oleh Diana L. Eck sebagai pergumulan yang aktif. Bedanya, Walzer berangkat dari kesediaan menerima perbedaan yang merupakan ciri khas konsep toleransi sedangkan Diana L Eck berangkat dari keaktifan bergerak dalam perbedaan. Asumsinya, tidak satu pun orang yang tidak menerima kepelbagaian sebagai sesuatu yang *given, sunnatullah*. Bersedia atau tidak, manusia global harus hidup dalam perbedaan identitas, tetapi tidak banyak yang bersedia untuk saling mempelajari satu sama lain untuk kepentingan perdamaian.

Untuk memotret kerukunan umat beragama di kota Kendari menyederhanakan teori toleransi aktif Walzer dan pluralisme Diana L Eck, dengan menggunakan empat variabel yaitu:

1. Variabel Pergumulan aktif dalam hubungan sosial
2. Variabel Kesiediaan untuk Pergumulan Aktif dalam hubungan keagamaan
3. Variabel Nilai dan Lokus sosial yang tersedia untuk membangun kerukunan
4. Variabel Dukungan Pemerintah

Indikator masing-masing variabel diukur berdasarkan rentang ukuran 0-4 dengan rincian indikator yaitu:

- 1-1,75 = sangat rendah
- 1,76-2,5 = rendah
- 2,6-3,25 = tinggi

- 3,26-4 = sangat tinggi.

POTRET KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI KOTA KENDARI (Tinjauan dalam beberapa Aspek)

Secara historis Kota Kendari tidak dapat dipisahkan dari pergumulan dua kerajaan yaitu Kerajaan Laiwoi dan Kerajaan Konawe. Namun akibat dari dominasi Belanda yang saat itu diwakili oleh Vosmaer membangun istana raja Suku Tolaki bernama TEBAU di sekitar pelabuhan Kendari pada tanggal 9 Mei 1832 sehingga atas dasar itulah setiap tanggal 9 Mei pada waktu itu dan sekarang dirayakan sebagai hari jadi Kota Kendari (Anwar dkk, 2006). Perkembangan selanjutnya Kota Kendari menjadi pusat perdagangan dari beberapa pulau di Sulawesi Tenggara termasuk dari Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan. Kondisi itulah yang mendukung terjadinya migrasi yang intens yang memusatkan perhatian pada Kota Kendari sebagai tujuan. Proses selanjutnya mengakibatkan proses akulturasi dan asimilasi tak dapat dielakkan antar etnik/suku dan agama.

Saat ini kota kendari berdasarkan data BPS Tahun 2014, memiliki jumlah penduduk sebanyak 314.126 jiwa. Sedangkan menurut data dari Kantor Kementerian Agama Per Agustus Tahun 2014 bahwa penganut umat beragama masing-masing terdiri dari Islam 257.064 jiwa, Kristen 10.695 jiwa, Katolik 3.895 jiwa, Hindu 483 jiwa, dan Budha 433 jiwa. Dengan demikian hanya Konghucu yang belum ada dari 6 agama/kepercayaan yang diakui oleh pemerintah. Kondisi keberagaman dan jumlah penganut yang cenderung merata pada beberapa kecamatan (walaupun Islam Mayoritas) telah melahirkan pola dan interaksi yang terbuka (*open interaction*) antar umat beragama.

Sebagaimana paradigma dalam memotret kerukunan ini, ditinjau dalam 4 variabel yaitu variabel pergumulan aktif dalam hubungan sosial, variabel pergumulan aktif dalam hubungan keagamaan, variabel nilai yang mendasari dan merawat hubungan kerukunan, dan peran pemerintah, yang diambil sebagai bentuk penyederhanaan paradigma yang dikemukakan oleh Walzer dan L. Eck.

1. Pergumulan Aktif dalam Hubungan Sosial

Pergumulan dalam hubungan sosial yang dipotret pada aspek ini menyangkut kesediaan masing-masing pihak mengundang atau menghadiri undangan dalam berbagai kegiatan sosial, bergaul dan berorganisasi dalam satu wadah. Harapannya pada aspek ini berada pada kategori tinggi, akan tetapi hasil survey menunjukkan tingkat hubungan masih dibawah standar. Karena secara rata-rata kategori indeks berada pada level 2,98, memang sudah masuk pada kategori tinggi, akan tetapi masih berada dibawah nilai 3 artinya masih dibawah standar. Mengenai detail indeks hasil survey 130 responden yang diedarkan angket maka dapat diuraikan pada tabel berikut.

No	Subvariabel	Indeks	Kategori
1	Bersedia Berteman	3,10	
2	Bersedia mengundang	2,94	
3	Bersedia menghadiri undangan	2,85	
4	Bersedia bertetangga	3,13	
5	Bersedia memberi bantuan	3,17	

6	Bersedia berjual beli	3,12	Tinggi
7	Bersedia satu organisasi	2,90	
8	Bersedia dipimpin orang beda agama	2,72	
9	Bersedia mendengar saran tokoh agama lain	2,87	
	Indeks	2,98	

Sumber data: angket yang diolah

Pada data tersebut menunjukkan bahwa hubungan sosial sudah berada pada kategori tinggi akan tetapi masih berada dibawah standar yaitu 2,98. Beberapa aspek kelihatan mamsih rendah yaitu kesediaan dalam satu wadah, kesediaan dipimpin oleh beda agama, kesediaan mendengarkan saran atau petuah dari tokoh beda agama dan kesediaan mengundang orang yang berbeda agama secara indeks masih perlu ditingkatkan. Kondisi ini memang beralasan karena relevan dengan hasil wawancara bahwa pada aspek-aspek tersebut kurang mendapatkan jawaban yang memuaskan, atau dengan kata lain cenderung tertutup.

Pada penelitian ini juga memetakan responden berdasarkan agama dan pengalaman interaksi. Untuk responden yang dipetakan berdasarkan agama menggambarkan ada 12 (15,8% dari 91) responden beragama Islam yang memiliki persepsi yang tertutup terhadap pergaulan antar agama berbasis sosial (bahkan ada satu orang responden yang sangat tertutup). Sedangkan dari kelompok agama lain seluruhnya berada pada persepsi yang relatif terbuka.

Dari segi pengalaman interaksi, menunjukkan semakin tinggi pengalaman interaksi seseorang maka semakin tinggi pula peluang hubungan itu terbuka. Sebaliknya semakin rendah pengalaman interaksi seseorang maka hubungannya juga mengarah kepada hubungan yang tertutup. Pengalaman interaksi berimplikasi pada persepsi responden untuk membuka diri pada pergaulan sosial. Semakin tinggi tingkat interaksinya akan semakin terbuka pada penerimaan secara sosial. Hubungan interaksi dari aspek hubungan sosial beberapa aspek yang masih rendah tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain masalah pengalaman interaksi dan sikap terbuka yang belum merata dari kelompok Islam sebagai penganut mayoritas di Kota Kendari. Selain didukung oleh hasil wawancara juga memiliki relevansi dengan hasil penelitian Litbang Tahun 2014 yang menggambarkan pentingnya membangun kebiasaan dalam hubungan interaksi antar umat beragama, sehingga salah satu rekomendasi dari penelitian tersebut adalah introduksi pendidikan *open intraction* di sekolah khususnya pada level SMP dan SMA.

2. Pergumulan Aktif dalam Hubungan Keagamaan

Pergumulan aktif dalam hubungan keagamaan diukur dalam 9 sub variabel. Temuan menunjukkan bahwa pada aspek ini termasuk dalam kategori rendah yaitu berada pada level atau rentang rata-rata 2,34 (rendah). Adapaun detail subvariabel dan kategorinya masing-masing dapat digambarkan sebagai berikut.

No	Subvariabel	Indeks	Kategori
1	Bersedia mengundang agama lain ke acara keagamaan saya	2,21	Rendah
2	Bersedia menghadiri acara keagamaan agama lain	2,15	Rendah
3	Bersedia ikut aktif dalam acara keagamaan orang lain	1,83	Rendah
4	Bersedia memberi bantuan dana kepada kegiatan agama lain	2,28	Rendah

5	Bersedia membantu pembangunan rumah ibadah agama lain	2,12	Rendah
6	Tidak keberatan jika ada penganut agama lain mendirikan rumah ibadah di lingkungan saya	2,64	Tinggi
7	Tidak keberatan dengan kegiatan agama lain di sekitar lingkungan saya	2,79	Tinggi
8	Bersedia berdialog dan musyawarah dengan orang berbeda agama	2,85	Tinggi
9	Bersedia ikut dalam kegiatan doa bersama dengan agama lain	2,22	Rendah
	Indeks Keseluruhan	2,34	Rendah

Sumber data: angket yang diolah

Data pada tabel ini menunjukkan bahwa secara umum nilai indeks untuk variabel ke-2 (hubungan keagamaan) berada pada angka 2,38 atau kategori rendah. Meski rendah, namun posisi angka ini lebih dekat ke indeks tinggi (2,6-3,25). Lebih tinggi 0,62 poin dari nilai ambang batas bawah (1,76) dan lebih rendah 0,12 poin dari nilai ambang batas atas (2,5). Ada tiga sub variabel yang memberi sumbangan tinggi pada variabel ini yaitu sub variabel 6 *tidak keberatan jika ada penganut agama lain mendirikan rumah ibadah di lingkungan saya*, sub variabel 7 *tidak keberatan dengan kegiatan agama lain*, dan sub variabel 8 *bersedia berdialog dan musyawarah dengan orang berbeda agama*. Ketiga sub variabel mendapatkan nilai tinggi (lihat tabel) Sedangkan sub-variabel lainnya menunjukkan nilai rendah, bahkan sub variabel 2 *bersedia ikut aktif dalam acara keagamaan orang lain*, mendapatkan nilai yang mendekati level sangat rendah; 1,83.

Hubungan keagamaan oleh masing-masing penganut menganggap sensitif dan masuk dalam kategori persoalan internal. Padahal dalam pandangan Islam persoalan yang tidak boleh melibatkan umat lain adalah dalam perkarah ibadah mahdoh yaitu ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah SWT atau biasa juga disebut dengan ibadah pokok. Sedangkan dari segi muamalah selama tidak ada larangan yang secara tegas melarangnya maka boleh saja dilakukan. Pada hal dimasa Rasulullah SAW dalam sejarah piagam madinah orang-orang nasrani diberikan ruang pada emperan mesjid untuk menjalankan ibadahnya saat itu. Begitu pula dalam hal lain Rasulullah menganjurkan membantu suadaranya yang beragama nasrani dan Yahudi saat itu. Artinya bahwa hubungan keagamaan dalam hal-hal tertentu mestinya bisa ditingkatkan melalui transformasi pengetahuan keagamaan dalam dimensi sosial dan kemanusiaan. Dalam konteks Kendari kelompok yang mulai membangun hubungan dari aspek ini adalah dari kelompok organisasi NU khususnya Ansor yang memerintahkan Bansernya untuk membantu menjaga gereja pada saat natal (Hasil wawancara dengan Ketua Ansor Sultra, 2015). Dengan demikian data ini menunjukkan bahwa hubungan keagamaan masih rendah akan tetapi masih ada potensi untuk dikuatkan dengan melakukan revitalisasi jalinan organisasi (pengorganisasian) pada level pemuda dan mahasiswa.

3. Nilai yang Mendasari dan Merawat Kerukunan

Sebagai masyarakat yang berbudaya dan beragama tentunya segala sikapnya merupakan potret dari budaya dan agama yang dianutnya. Secara agama kerukunan merupakan nilai universal yang diajarkan oleh setiap agama, sedangkan secara budaya kearifan lokal masyarakat dari berbagai etnik/suku yang ada di Kota Kendari memiliki

nilai-nilai yang kuat, dengan anjuran untuk bergaul, menghargai sesama, dan membantu tanpa memandang agamanya. Kondisi ini terbukti dengan hasil indeks yang menunjukkan bahwa aspek variabel ke tiga ini berada pada kisaran 3,05 artinya tinggi. Mengenai detail gambaran indeks masing-masing subvariabel dari aspek ini sebagai berikut.

No	Subvariabel	Indeks	Kategori
1	Agama saya mengajarkan untuk bergaul dan menghormati penganut agama lain	3,44	Sangat tinggi
2	Pembangunan rumah ibadah harus dimusyawarahkan dengan semua unsur agama yang ada	3,01	Tinggi
3	Peran tokoh agama sangat penting dalam memelihara KUB	2,98	Tinggi
4	Peran tokoh adat dan etnik sangat penting dalam memelihara KUB	3,19	Tinggi
5	Kegiatan adat bisa membangun kerukunan antar umat beragama	2,98	Tinggi
6	Saling menghormati antar pemeluk agama sesuai dengan budaya masyarakat Sultra	3,20	Tinggi
7	Organisasi agama boleh membantu perayaan hari-hari besar agama lain	2,59	Rendah
	Indeks Kerukunan	3,05	Tinggi

Sumber data: *angket yang diolah*

Data pada tabel menunjukkan bahwa seluruh sub-variabel dalam variabel ketiga ini mendapatkan respon baik. Seluruhnya berada pada level indeks baik. Sub-variabel 1 mendapatkan nilai indeks yang sangat tinggi (lihat tabel). Sub-variabel 1 bersifat nilai. Seluruh responden percaya bahwa agama mereka sangat mengajarkan untuk pergaulan dan penghormatan terhadap agama lain. Tentu saja yang dimaksud adalah pergaulan sosial dan penghormatan yang bersifat sosial.

Pada Sub-variabel 2 yang mendapatkan nilai tinggi tentang peran tokoh agama. Tampak dengan jelas, para responden memberi kepercayaan penuh kepada tokoh agama sebagai *leading sector* terciptanya perdamaian sosial dan kerukunan antar umat beragama.

Sub variabel yang paling rendah adalah yang terakhir (7). Sub-variabel ini mendapatkan nilai mendekati ambang batas indeks rendah (2,50). Ini menunjukkan konsistensi persepsi responden dari awal. Mereka agak hati-hati memberi afirmasi terhadap hal-hal yang bersifat “internum” agama. Bagi pemeluk agama khususnya dari kalangan Islam memandang bahwa perayaan hari besar seperti hari raya Id, Maulid, Isra Mi’raz, dan lain-lain adalah kegiatan keagamaan yang harus dikemas secara eksklusif (tertutup) dari agama lain, bahkan menerima atau meminta bantuan pun dari umat agama lain untuk kegiatan tersebut masih dianggap tabu. Walaupun demikian pada aspek ini secara nilai sesungguhnya baik dalam nilai agama maupun internalisasi nilai budaya masing-masing pemeluknya memahami bahwa kerukunan itu sesuatu yang baik dan bentuk wujud moralitas (etika) yang tinggi derajatnya dalam budaya. Misalnya saja bagi tolaki mengenal istilah “samaturu” filosofi suku Muna dengan Istilah “Pokaowa” dan Buton dengan istilah “Pobinci-binci kuli” menunjukkan betapa tinggi penghargaan kemanusiaan menata hubungan sosial tanpa memandang agamanya. Dengan demikian bahwa tidak jalannya suatu kerukunan sesungguhnya bukan pada aspek rendahnya

pengetahuan nilai oleh penganutnya akan tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh motif politik dan kepentingan kekuasaan yang mengorbankan hubungan sosial umat beragama. Hal ini juga selaras dengan penelitian Idham (2011) Konflik ATM di Sulbar yang mengulas inti persoalan konflik lebih didominasi oleh faktor politik dan kesenjangan ekonomi yang dipengaruhi akses terhadap sumberdaya politik yang lemah. Dengan demikian pada aspek ini secara faktual dikendari memiliki nilai-nilai agama dan budaya dan masing-masing agama telah mengejawantahkannya dalam hubungan atau interkasi antar umat beragama, tentunya harus dirawat dan dikuatkan baik melalui jalur formal, non formal maupun informal.

4. Peran Pemerintah

Peran pemerintah merupakan variabel pengukur karena dalam sejarah negara-bangsa peran pemerintah (pengelola negara) memiliki posisi strategis dan stakeholder kunci pada berbagai level pemerintahan, termasuk di Kota Kendari. Dari 8 variabel dari aspek ini, menunjukkan hasil temuan yang baik, karena berada pada rentang 3,01 (tinggi). Walaupun beberapa variabel tertentu masih rendah, hal ini juga didukung oleh beberapa hasil wawancara pada informan artinya bahwa pemerintah masih harus terus meningkatkan peran dalam upaya mendorong dan meningkatkan kerukunan umat beragama di Kota Kendari.

No	Subvariabel	Indeks	Kategori
1	Pembangunan Rumah Ibadah Sebaiknya mendapatkan jaminan dari pemerintah	3,02	Tinggi
2	Keterlibatan pemerintah mempercepat proses penyelesaian konflik	2,98	Tinggi
3	Pemerintah sebaiknya melindungi kelompok yang mendapatkan tindakan kekerasan dari kelompok lain	3,30	Sangat Tinggi
4	Pemerintah seharusnya menindak tegas ormas yang melakukan tindakan kekerasan	3,24	Tinggi
5	Pemerintah harus memfasilitasi dialog antar kelompok agama yang berbeda pandangan	2,96	Tinggi
6	Pemerintah tidak boleh mencampuri praktik ibadah agama tertentu	2,32	Rendah
7	Pemerintah sebaiknya bekerja sama dengan tokoh agama untuk meningkatkan KUB	3,15	Tinggi
8	Pemerintah sebaiknya memrogramkan kurikulum KUB sebagai muatan lokal	3,16	Tinggi
	Indeks Keseluruhan	3,01	Tinggi

Sumber data: angket yang diolah.

Pada aspek peran pemerintah dipotret dalam 8 variabel, sehingga pada variabel-variabel tersebut menunjukkan bahwa seluruh sub variabel mendapatkan nilai tinggi kecuali sub-variabel 6. Sub variabel ini 'hanya' mendapatkan nilai 2,32. Mayoritas responden menginginkan pemerintah ikut campur dalam urusan agama masyarakat. Idealnya pemerintah tidak boleh terlibat dalam urusan ibadah agama tertentu. Ini negara kebangsaan bukan negara agama. Tetapi responden cenderung melihatnya dalam perspektif perdamaian. Sederhananya begini. Tafsir terhadap perbedaan agama seringkali muncul ke permukaan dalam bentuk konflik. Mulai dari kasus yang ringan

seperti perbedaan tafsir terhadap 1 Ramadhan dan Syawal hingga yang berat seperti perbedaan cara pandang terhadap negara dan kenabian. Warga menginginkan pemerintah memberi intervensi terhadap ini. Tentu saja kepentingannya agar perbedaan tafsir itu tidak meledak menjadi rusuh sosial. Dalam konteks hubungan antar umat beragama, konflik antar agama adalah tanggungjawab pemerintah. Kisruh pendirian rumah ibadah misalnya harus diselesaikan oleh negara.

Penelitian Litbang Tahun 2014 menyorot problematikan pendirian rumah ibadah dan kebebasan menjalankan ibadah masih menyisakan ketidak seimbangan khususnya yang dialami oleh kelompok minoritas. Hal ini juga dikuatkan dengan hasil wawancara beberapa responden seperti Prof. Dr Gusti (Ketua WHDI Sultra) yang menuturkan bahwa perhatian pemerintah dalam hal pemberian bantuan dalam pelaksanaan kegiatan masing-masing umat beragama belum setara, hal ini dialami oleh beberapa kegiatan Wanita Hindu Dharma Indonesia cabang Sultra.

Data-data tersebut mengindikasikan bahwa peran pemerintah disatu sisi sangat dibutuhkan dalam mendukung kerukunan umat beragama, akan tetapi pada saat bersamaan belum memberikan bentuk perlakuan yang seimbang terhadap umat-umat beragama. Tentunya keluhan ini harus menjadi perhatian penting dari aspek ini bagi pemerintah dalam upaya membangun kesetaraan dan kerukunan yang lebih baik lagi.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan yang dapat ditarik dari temuan ini yaitu Indeks kerukunan antar umat beragama di Kota Kendari berada pada indeks tinggi. Ini berarti kerukunan antar umat sedang berada dalam kondisi yang baik. Penerimaan dan penghargaan terhadap sesama warga relatif tinggi. Hal ini ditunjukkan dari 4 aspek yang menjadi variabel penelitian. **Pertama**, Adanya sikap terbuka dalam konteks hubungan sosial. Bahkan, untuk responden yang berasal dari kelompok agama minoritas menampakkan keterbukaan dalam hal keagamaan. Sedangkan untuk kelompok mayoritas walaupun sedikit mengalami hambatan psikologis untuk mengartikulasi pergaulan akan tetapi tetap menunjukkan hubungan pergaulan yang terbuka dalam konteks keagamaan sedangkan dalam hal hubungan sosial tidak ada hambatan sedikitpun, berjalan dengan baik dan saling menghargai. **Kedua**, hubungan keagamaan masih relatif rendah karena asumsi dan sikap yang masih terkesan tertutup yang memandang hubungan keagamaan menyangkut ritual masing-masing, padahal ada bagian-bagian tertentu pada aspek ini dapat di kerjasamakan dan dilakukan secara bersama. Ketiga, aspek nilai yang mendasari pergaulan masing-masing umat tidak terlepas dari internalisasi pada nilai-nilai agama dan budaya lokal (local wisdom) seperti Tolaki, Muna, Buton, Bugis, Makasar, Tator, Jawa, dan Batak. **Keempat**, peran pemerintah yang sudah baik walaupun pada sisi tertentu masih terdapat kesenjangan perhatian pada kegiatan keagamaan pihak minoritas.

Berangkat dari kondisi itulah melalui tulisan ini beberapa hal yang perlu direkomendasikan yaitu; **pertama**, perlunya penguatan sistim pengorganisasian dan dialog antar kelompok umat beragama yang dibangun dari bahwa (bukan karena inisiatif pemerintah). **Kedua**, penguatan kapasitas dan introduksi nilai-nilai pluralitas dalam membangun komunikasi dakwah kerukunan pada tokoh-tokoh agama. dan **ketiga**, penguatan peran pemerintah dan perhatian yang seimbang pada kegiatan-kegiatan keagamaan seluruh agama yang ada di Kota Kendari.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, ddk. 2006. *Sejarah Kota Kendari*. Humaniora Utama Press. Bandung

- Bungin, Burhan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Kencana Prenada Media Group : Jakarta.
- Eck, Diana L. 2003. *Encountering God: A Spritual Journey from Bozeman to Benaras*, MA: Beacon Press.
- Editorial Media Indonesia. 2014. www.metrotvnews.com.
- Hamdan. 2008. *Kerukunan Umat Beragama*. <http://www.win2pdf.com>
- Idham. 2011. *Konflik ATM*. Pascasarjana Universitas Negeri Makassar (disertasi).
- Munir, 2011. *Sosiologi suatu pengantar*, Jakarta: PT Rajawali Grafindo.
- Prasetyo, Bambang & Linah Miftahul Jannah. 2005. *Metode penelitian Kuantitatif: Metode dan Aplikasi*. Raja Grafindo Prasada: Jakarta
- Susanto, Trisno. 2010. *Melampaui Toleransi*. www.kompas.co.id
- Tim Peneliti Litbang Agama Makassar. 2009-2013. *Potret Kerukunan Umat Beragama di Sulsel, Suteng, Sulut, Kaltim, Gorontalo dan Sulbar*. Balai Litbang Agama Makassar.
- Turner. Bryan,S. 1991. *Agama dan Teori Sosial*. Yogyakarta:Ircisod.
- Walzer, Michael. 1997. *On Toleration*. Yale University Press : New Haven and London.
- Wanggai, Toni Victor. 2009. *Rekonstruksi Sejarah Umat Islam di Tanah Papua*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI.